

**BPRS HARTA INSAN KARIMAH JAWA TENGAH**

# **LAPORAN KEBERLANJUTAN 2024**



Jl. Sunan Bonang No 27 Tambaksari Kidul,  
Kembaran, Banyumas



(0281) 6843115



[www.hikjateng.co.id](http://www.hikjateng.co.id)

**Lembar Persetujuan**

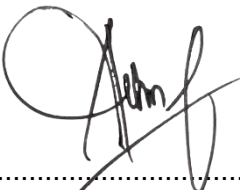
**LAPORAN KEBERLANJUTAN  
PT BPRS HARTA INSAN KARIMAH JAWA TENGAH  
TAHUN 2024**

Direksi :

  
(.....)

**Muhamad Bukhori**

Direktur Utama

  
(.....)

**Ade Cepi Abdul Adzim**

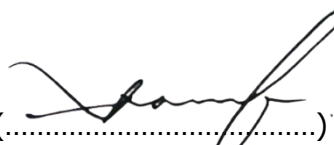
Direktur

Komisaris :

  
(.....)

**Mochammad Yana Aditya**

Komisaris Utama

  
(.....)

**Mokhamad Amin**

Komisaris



## DAFTAR ISI

|                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>BAB I STRATEGI KEBERLANJUTAN</b>                                                                              | 1  |
| <b>BAB II KINERJA ASPEK BERKELANJUTAN</b>                                                                        | 2  |
| A. Aspek Ekonomi                                                                                                 | 2  |
| B. Aspek Lingkungan Hidup                                                                                        | 3  |
| C. Aspek Sosial                                                                                                  | 3  |
| <b>BAB III PROFIL PERUSAHAAN</b>                                                                                 | 4  |
| A. Visi, Misi dan Nilai Berkelanjutan                                                                            | 4  |
| B. Profil BPRS HIK Jawa Tengah                                                                                   | 5  |
| C. Skala Usaha                                                                                                   | 6  |
| D. Produk Dan Layanan                                                                                            | 7  |
| E. Keanggotaan Pada Asosiasi                                                                                     | 8  |
| F. Perubahan Perusahaan yang Bersifat Signifikan                                                                 | 9  |
| <b>BAB IV PENJELASAN DIREKSI</b>                                                                                 | 10 |
| A. Kebijakan Merespon Tantangan dalam Pemenuhan Strategi Keberlanjutan                                           | 10 |
| B. Penerapan Keuangan Berkelanjutan                                                                              | 11 |
| C. Strategi Pencapaian Target                                                                                    | 12 |
| <b>BAB V TATA KELOLA KEBERLANJUTAN</b>                                                                           | 14 |
| A. Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan                                                             | 14 |
| B. Pengembangan Kompetensi Keuangan Berkelanjutan                                                                | 15 |
| C. Manajemen Risiko Penerapan Keuangan Berkelanjutan                                                             | 15 |
| D. Pendekatan Kepada Pemangku Kepentingan dalam Penerapan Keuangan Berkelanjutan                                 | 17 |
| E. Permasalahan, Perkembangan, dan Pengaruh terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan                            | 17 |
| <b>BAB VI KINERJA KEBERLANJUTAN</b>                                                                              | 18 |
| A. Kegiatan Membangun Budaya Berkelanjutan                                                                       | 18 |
| B. Kinerja Ekonomi                                                                                               | 18 |
| C. Kinerja Sosial                                                                                                | 18 |
| D. Kinerja Lingkungan Hidup                                                                                      | 20 |
| E. Tanggung Jawab Pengembangan Produk dan Jasa Keuangan Berkelanjutan                                            | 21 |
| <b>Lampiran Kegiatan Keuangan Berkelanjutan BPRS HIK Jawa Tengah Tahun 2024 - Bidang Sosial &amp; Lingkungan</b> | 23 |

## **BAB I**

### **STRATEGI KEBERLANJUTAN**

Sesuai dengan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, BPRS HIK Jawa Tengah telah melaksanakan kegiatan yang sejalan dengan visi dan misi perusahaan sebagai komitmen untuk menjaga keberlanjutan usaha dalam kerangka tanggung jawab terhadap Nasabah, Pegawai, Pemegang Saham serta Lingkungan sekitar. BPRS HIK Jawa Tengah sangat menyadari terkait isu pentingnya pengelolaan keuangan berkelanjutan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam menjalankan bisnis PerBPRSan. BPRS HIK Jawa Tengah mendukung penuh pelaksanaan program keuangan berkelanjutan yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kami berkomitmen untuk mendukung dan menjalankan program-program yang mendukung pencapaian target dan implementasi keuangan berkelanjutan. Pergerakan ekonomi yang semakin kompetitif, diiringi dengan penerapan keuangan berkelanjutan yang terus menjadi isu hangat global, semakin disadari bahwa keberlanjutan (*sustainability*) sudah menjadi sebuah keharusan dan kebutuhan. Isu lingkungan menjadi sorotan utama yang mendorong BPRS HIK Jawa Tengah menyusun strategi untuk mendukung implementasi program keberlanjutan. Strategi BPRS HIK Jawa Tengah dalam mewujudkan keuangan berkelanjutan, mengutamakan 3 aspek utama yaitu Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Hidup.

Dalam implementasinya, strategi keberlanjutan BPRS HIK Jawa Tengah berfokus pada tiga pilar utama :

1. Pengembangan Produk Pembiayaan Berkelanjutan  
BPRS HIK Jawa Tengah mendukung sektor-sektor produktif yang tidak hanya layak secara ekonomi, tetapi juga memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif. Seperti pada sektor UMKM yang ramah lingkungan, inklusif, serta berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.
2. Penguatan Sumber Daya Manusia dan Budaya Kerja Berkelanjutan  
Melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia yang berkesinambungan, BPRS HIK Jawa Tengah membangun budaya kerja yang dilandasi pada etika, kepedulian sosial, dan kesadaran lingkungan. Pegawai didorong untuk menjadi agen perubahan yang tidak hanya profesional secara kompetensi, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap pembangunan berkelanjutan.
3. Kolaborasi untuk Ekosistem Keuangan Syariah Berkelanjutan  
BPRS HIK Jawa Tengah membangun sinergi dengan komunitas, mitra strategis, dan regulator dalam upaya memperkuat ekosistem keuangan syariah yang berkelanjutan. Kolaborasi diwujudkan melalui pengembangan digitalisasi layanan, peningkatan literasi keuangan syariah, serta program-program edukatif yang memberdayakan masyarakat dan meningkatkan inklusi keuangan.

Dengan strategi ini, BPRS HIK Jawa Tengah berharap menjadi BPRS Syariah yang tidak hanya sehat dan tumbuh, tetapi juga memberi kontribusi nyata bagi keberlanjutan lingkungan, sosial, dan tata kelola yang berkualitas.

## BAB II

### KINERJA ASPEK BERKELANJUTAN

#### A. Aspek Ekonomi

Berikut aspek ekonomi selama 3 tahun terakhir, sebagai berikut :

| NO | KETERANGAN             | TAHUN 2022        | TAHUN 2023        | TAHUN 2024        |
|----|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | Pendapatan Operasional | Rp 1.370.915.042  | Rp 2.399.419.116  | Rp 5.610.600.606  |
| 2  | Laba Bersih            | -Rp 1.947.307.000 | -Rp 1.105.525.991 | -Rp 1.122.195.002 |
| 3  | Outstanding Pembiayaan | Rp 10.733.386.185 | Rp 20.445.444.182 | Rp 36.406.787.974 |
| 4  | Dana Pihak Ketiga      | Rp 13.938.424.539 | Rp 25.486.682.813 | Rp 49.156.606.438 |
| 5  | Aset                   | Rp 15.317.106.231 | Rp 31.123.403.255 | Rp 54.676.923.308 |

PT BPRS HIK Jawa Tengah merupakan BPR Syariah Hasil akuisisi dari BPRS Khasanah Ummat (yang didirikan tahun 2005 berdasarkan Akta Notaris Nomor C-09130 ht.01.01.TH.2005) proses akuisisi pada tahun 2023 merupakan tonggak berdirinya BPRS HIK Jawa Tengah. BPRS HIK Jawa Tengah mulai efektif beroperasi pada bulan Juni 2023 sesuai dengan Keputusan RUPS Nomor 26 Tanggal 28 Juni 2023. Dan di tahun 2024 BPRS masih membukukan kerugian karena harus membentuk PPAP pembiayaan bermasalah dan menyelesaikan permasalahan masa lalu (sebelum proses akuisisi). Namun demikian BPRS HIK Jawa Tengah terus memperkuat kontribusinya dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, khususnya melalui sektor pembiayaan properti yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan aset, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan kesehatan Masyarakat. Dan portofolio pembiayaan property yang dimaksud pada proyek-proyek yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak, sehat, dan memenuhi standar sanitasi dasar. Hal ini sejalan dengan komitmen BPRS HIK Jawa Tengah untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan khususnya target air bersih dan sanitasi layak untuk kota dan permukiman yang berkelanjutan.

Berikut data pembiayaan segmen properti di BPRS HIK Jawa Tengah dalam periode 3 tahun terakhir :

(Dalam ribuan rupiah)

| Uraian                          | 2024       | 2023       | 2022 |
|---------------------------------|------------|------------|------|
| Outstanding Pembiayaan Properti | 14.423.874 | 10.194.270 | 0    |
| NOA                             | 43         | 32         | 0    |

## **B. Aspek Lingkungan Hidup**

Sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan, BPRS HIK Jawa Tengah secara konsisten mendorong budaya sadar lingkungan di seluruh lini operasional. Upaya pelestarian lingkungan hidup dilakukan tidak hanya melalui program-program eksternal, tetapi juga melalui kebiasaan kerja harian yang mencerminkan kepedulian terhadap alam dan efisiensi sumber daya.

Dalam rangka mendukung program Go Green, BPRS HIK Jawa Tengah mengimplementasikan berbagai langkah konkret untuk efisiensi energi dan pengelolaan limbah secara bijak. Setiap pegawai dihimbau untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan kebijakan internal ramah lingkungan yang meliputi :

### **1. Efisiensi Penggunaan Listrik**

Pegawai didorong untuk mematikan lampu, komputer, printer, dan perangkat elektronik lainnya ketika tidak digunakan, sebagai langkah sederhana namun berdampak besar dalam mengurangi konsumsi energi.

### **2. Penghematan Air**

Kesadaran akan keterbatasan sumber daya air diterapkan melalui kebijakan penggunaan air secara efisien, baik di area kerja maupun fasilitas umum kantor.

### **3. Pengurangan Penggunaan Kertas (*Paperless*)**

BPRS HIK Jawa Tengah berkomitmen mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik melalui digitalisasi proses bisnis, seperti sistem administrasi digital, penggunaan email internal, dan dokumentasi elektronik.

### **4. Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan**

Di lingkungan kantor, dilakukan pemilahan sampah menjadi organik dan non-organik untuk mendukung pengolahan limbah yang lebih bertanggung jawab dan terencana.

### **5. Pengendalian penggunaan Bahan Bakar Kendaraan**

BPRS HIK Jawa Tengah juga mendorong efisiensi penggunaan kendaraan dinas dan pribadi melalui pengaturan rute kerja yang efektif serta meminimalkan perjalanan yang tidak mendesak, guna mengurangi emisi karbon.

## **C. Aspek Sosial**

Aspek sosial yang merupakan uraian mengenai dampak positif dan negatif dari penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. BPRS HIK Jawa Tengah setiap tahun secara rutin melaksanakan kegiatan sosial antara lain pemberian bantuan sembako bagi dhuafa, Berbagi takjil gratis, bantuan kepada pondok pesantren dan kegiatan bakti sosial bekerja sama dengan pihak lain.

2. BPRS HIK Jawa Tengah mengelola dan menawarkan produk dan layanan utama dalam bentuk penyaluran pembiayaan dan simpanan kepada nasabah serta berkomitmen untuk memberikan layanan yang setara atas produk dan/atau jasa yang disediakan.

3. BPRS HIK Jawa Tengah berupaya untuk menyampaikan informasi produk atau jasa perBPRS-an yang akurat kepada nasabah melalui sosialisasi secara langsung maupun melalui media sosial.

## **BAB III**

### **PROFIL PERUSAHAAN**

#### **A. Visi, Misi dan Nilai Berkelanjutan**

##### **1. Visi**

Terwujudnya BPRS Syariah yang Unggul dan Terpercaya.

##### **2. Misi**

- a. Menjalankan usaha perBPRSan yang sehat dan amanah  
BPRS HIK Jawa Tengah berkomitmen untuk mengelola usaha perBPRSan dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik (Good Corporate Governance). Seluruh aktivitas bisnis dijalankan secara profesional dan berlandaskan nilai-nilai amanah, sehingga menciptakan stabilitas keuangan yang kuat dan berkelanjutan.
- b. Memberikan pelayanan yang terbaik dan islami  
Dengan mengedepankan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek layanan, BPRS HIK Jawa Tengah berusaha memberikan pengalaman perBPRSan yang nyaman, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Pelayanan yang prima dan berbasis syariah menjadi prioritas utama dalam membangun kepercayaan dan kepuasan nasabah.
- c. Berperan aktif dalam pengembangan dunia usaha dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat  
Sebagai bagian dari sistem keuangan syariah, BPRS HIK Jawa Tengah berupaya mendorong pertumbuhan dunia usaha, khususnya sektor UMKM. Melalui pembiayaan yang sesuai syariah, BPRS ini berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
- d. Meningkatkan kemakmuran pemegang saham, pengurus, dan karyawan  
Keberhasilan BPRS HIK Jawa Tengah tidak hanya diukur dari pertumbuhan bisnis, tetapi juga dari kesejahteraan seluruh pemangku kepentingan. BPRS berupaya menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, memberikan apresiasi kepada karyawan, serta memastikan manfaat optimal bagi pemegang saham dan pengurus.
- e. Menjalankan misi dakwah yang *Rahmatan Lil Alamin*  
BPRS HIK Jawa Tengah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menyebarkan nilai-nilai Islam dalam aktivitas perBPRSan. Melalui edukasi, sosialisasi, dan penerapan ekonomi syariah, BPRS HIK Jawa Tengah berperan dalam mendukung dakwah yang membawa keberkahan bagi seluruh umat.

### 3. Nilai Keberlanjutan

Dalam menjalankan keuangan berkelanjutan, BPRS HIK Jawa Tengah berpegang pada nilai-nilai utama yang mencerminkan komitmen terhadap keberkahan, inklusivitas, dan kesejahteraan bersama. Nilai-nilai ini menjadi dasar dalam setiap aktivitas perBPRSan untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat, ekonomi, dan lingkungan. Adapun nilai Keberlanjutan di BPRS HIK Jawa Tengah yaitu :

- Bekerja sebagai ibadah
- Ramah-tamah dan kekeluargaan
- *Akhlakul Karimah*
- Disiplin, tanggung jawab dan Kerjasama
- Orientasi pada proses dan hasil terbaik
- Kreatif dan inovatif
- Perbaikan berkelanjutan
- Siddiq, Amanah, fathanah dan Ikhlas
- Layanan Prima

### B. Profil BPRS HIK Jawa Tengah

PT. BPRS HIK Jawa Tengah merupakan BPR Syariah Hasil akuisisi dari BPRS Khasanah Ummat (yang didirikan tahun 2005 berdasarkan Akta Notaris Nomor C-09130 ht.01.01.TH.2005) proses akuisisi pada tahun 2023 merupakan tonggak berdirinya BPRS HIK Jawa Tengah. PT. BPRS HIK Jawa Tengah mulai efektif beroperasi pada bulan Juni 2023 sesuai dengan Keputusan RUPS Nomor 26 Tanggal 28 Juni 2023

Nama Perusahaan : PT BPR Syariah Harta Insan Karimah Jawa Tengah  
 Bidang Usaha : PerBPRSan  
 Alamat : Jl. Sunan Bonang No.27, Dusun I, Tambaksari Kidul, Kec. Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53182  
 No.Telp : (0281) - 684 3115  
 No. Fax : (0281) - 684 3115  
 Email : [bprshikjateng@gmail.com](mailto:bprshikjateng@gmail.com)  
 Website : [www.hikjateng.co.id](http://www.hikjateng.co.id)

### Kantor Layanan :

| Kantor             | Alamat                                                       | No Telepon     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| Kantor Pusat       | Jl. Sunan Bonang No 27 Tambaksari Kidul, Kembaran, Banyumas  | (0281) 6843115 |
| Kantor Kas Sumpiuh | Jl. Raya Sumpiuh No.163 Karanggeringging, Sumpiuh, Banyumas. | (0282) 497794  |

### C. Skala Usaha

#### 1. Total Aset dan Total Kewajiban

| Keterangan | 2024           | 2023           | 2022           |
|------------|----------------|----------------|----------------|
| Aset       | 54.676.923.308 | 31.123.403.255 | 15.317.106.231 |
| Kewajiban  | 49.567.717.450 | 25.547.902.395 | 14.086.079.380 |

#### 2. Jumlah Pegawai

Pada tahun 2024 BPRS HIK Jawa Tengah memiliki SDM total 18 orang. Jumlah ini bertambah 2 orang dibanding tahun 2023, dimana pada tahun 2023 BPRS HIK Jawa Tengah memiliki SDM total 16 orang. BPRS HIK Jawa Tengah akan terus meningkatkan jumlah dan keahlian tenaga kerja seiring dengan kebutuhan dan perkembangan perusahaan.

##### a. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

| Jenis Kelamin | 2024   |           | 2023   |           | 2022   |           |
|---------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|               | Jumlah | Komposisi | Jumlah | Komposisi | Jumlah | Komposisi |
| Laki-Laki     | 10     | 55,56%    | 9      | 56,25%    | 12     | 66,67%    |
| Perempuan     | 8      | 44,44%    | 7      | 43,75%    | 6      | 33,33%    |
| Jumlah        | 18     | 100,00%   | 16     | 100,00%   | 18     | 100,00%   |

##### b. Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

| Status Pegawai  | 2024   |           | 2023   |           | 2022   |           |
|-----------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|                 | Jumlah | Komposisi | Jumlah | Komposisi | Jumlah | Komposisi |
| Pegawai Tetap   | 8      | 44,44%    | 7      | 43,75%    | 6      | 33,33%    |
| Pegawai Kontrak | 10     | 55,56%    | 9      | 56,25%    | 12     | 66,67%    |
| Jumlah          | 18     | 100,00%   | 16     | 100,00%   | 18     | 100,00%   |

##### c. Komposisi Pegawai berdasarkan Usia

| Rentang Usia    | 2024   |           | 2023   |           | 2022   |           |
|-----------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|                 | Jumlah | Komposisi | Jumlah | Komposisi | Jumlah | Komposisi |
| < 25 Tahun      | 3      | 16,67%    | 5      | 31,25%    | 1      | 5,56%     |
| > 25 - 35 Tahun | 10     | 55,56%    | 6      | 37,50%    | 10     | 55,56%    |
| > 36 - 45 Tahun | 3      | 16,67%    | 5      | 31,25%    | 6      | 33,33%    |
| > 45 - 55 Tahun | 2      | 11,11%    | 0      | 0,00%     | 1      | 5,56%     |
| Jumlah          | 18     | 100,00%   | 16     | 100%      | 18     | 100,00%   |

##### d. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

| Jenjang Pendidikan | 2024   |           | 2023   |           | 2022   |           |
|--------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|                    | Jumlah | Komposisi | Jumlah | Komposisi | Jumlah | Komposisi |
| S2                 | 1      | 5,56%     | 0      | 0,00%     | 1      | 5,56%     |
| S1                 | 11     | 61,11%    | 11     | 68,75%    | 8      | 44,44%    |
| D3                 | 0      | 0,00%     | 0      | 0,00%     | 1      | 5,56%     |
| SLTA               | 6      | 33,33%    | 5      | 31,25%    | 8      | 44,44%    |
| Jumlah             | 18     | 100,00%   | 16     | 100,00%   | 18     | 100,00%   |

#### 3. Kepemilikan Saham

Pada Tahun 2024 kepemilikan saham di BPRS HIK Jawa Tengah sebagai berikut:

Lembar Saham : 82.429 Lembar Saham  
 Total Nilai Saham : Rp. 11.725.900.000,-  
 Jumlah Pemegang Saham : 17 Orang, dengan PT Induk HIK sebagai PSP.

Rincian kepemilikan saham PT Induk HIK sebagai berikut:

Lembar Saham : 32.000 Saham  
Total Nilai Saham : Rp. 3.200.000.000,-  
Persentase Kepemilikan : 38,82%

#### 4. Wilayah Operasional

Wilayah Operasional BPRS HIK Jawa Tengah mencakup wilayah Provinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Banyumas

### D. Produk Dan Layanan

#### 1. Produk Pembiayaan dan Pendanaan

| NO | JENIS PRODUK | NAMA PRODUK                               |
|----|--------------|-------------------------------------------|
| 1  | Pembiayaan   | Pembiayaan ASN                            |
|    |              | Pembiayaan Pensiunan                      |
|    |              | Pembiayaan NON ASN                        |
|    |              | Pembiayaan PMI (Pekerja Migran Indonesia) |
|    |              | Pembiayaan Umum                           |
|    |              | Pembiayaan Developer                      |
|    |              | Pembiayaan Property                       |
| 2  | Pendanaan    | Tabungan SAKU                             |
|    |              | Tabungan KU                               |
|    |              | Tabungan Antar Bank                       |
|    |              | Tabungan Ceria                            |
|    |              | Tabungan Hari Raya                        |
|    |              | Tabungan Qurban                           |
|    |              | Tabungan Simpel                           |
|    |              | Deposito Mudharabah IB                    |
|    |              | Deposito ABP (Antar Bank Pasiva)          |

#### 2. Layanan

| NO | JENIS LAYANAN                             | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Layanan Jemput Bola Tabungan dan Deposito | Adalah mendatangi rumah/lokasi nasabah oleh petugas BPRS untuk melayani transaksi Tabungan dan deposito, sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan terutama bagi nasabah yang jauh dari lokasi kantor BPRS |
| 2  | Layanan HIKJ Goes To School (HGS)         | Adalah layanan dengan melakukan kunjungan ke sekolah yang sudah menjadi mitra maupun belum dalam rangka promosi produk, sosialisasi program, meningkatkan silaturahmi dan kerjasama dengan sekolah.            |

|   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | <i>Mobile Collector</i>         | Adalah media/alat untuk menunjang layanan jemput bola, dimana transaksi setoran Tabungan dapat dilakukan secara langsung dengan terkoneksi dengan CBS BPRS. Sehingga nasabah dapat mendapatkan hasil print saldo setelah melakukan setoran Tabungan.                        |
| 4 | Layanan Transfer Out Antar BPRS | Adalah kegiatan BPRS dalam rangka menambah layanan transaksi keuangan nasabah berupa layanan memindahkan dana (transfer) ke rekening lain yang menjadi penerima di BPRS lain menggunakan CMS (Cash management system) yang disediakan oleh BPRS koresponden mitra dari BPRS |

#### **E. Keanggotaan Pada Asosiasi**

1. ASBISINDO, adalah Perkumpulan BPRS Syariah Indonesia yang berdiri pada tanggal 31 Maret 1992 atau 17 Ramadhan 1412 H di Bandung. Keanggotaan Asbisindo untuk seluruh BPRS syariah, yaitu: BPRS Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan BPRS Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).
2. HIMBARSII adalah Perhimpunan BPRS Perekonomian Rakyat Syariah Seluruh Indonesia, yang sebelumnya berada dibawah naungan kompartemen BPR Syariah ASBISINDO. Terhitung sejak Februari 2024, telah berdiri sendiri sebagai organisasi resmi yang lebih mandiri.
3. Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Purwokerto adalah wadah yang mempertemukan berbagai pihak dalam industri jasa keuangan di wilayah Purwokerto. FKIJK Purwokerto bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antar anggota dalam rangka mengembangkan industri jasa keuangan

## F. Perubahan Perusahaan yang Bersifat Signifikan

Pada tahun 2024 terdapat perubahan signifikan pada porsi kepemilikan saham dengan rincian sebagai berikut :

| NO     | NAMA PEMEGANG SAHAM           | SAHAM 2023    |        | NAMA PEMEGANG SAHAM           | SAHAM 2024    |        |
|--------|-------------------------------|---------------|--------|-------------------------------|---------------|--------|
|        |                               | NOMINAL       | %      |                               | NOMINAL       | %      |
| SERI A |                               |               |        | SERI A                        |               |        |
| 1      | Ir. Oentoeng Edy Djatmiko, MP | 1.620.000.000 | 2,13%  | Ir. Oentoeng Edy Djatmiko, MP | 1.620.000.000 | 1,96%  |
| 2      | Ir. H. Purnama Sukardi, Phd   | 2.250.000.000 | 2,97%  | Ir. H. Purnama Sukardi, Phd   | 2.250.000.000 | 2,73%  |
| SERI B |                               |               |        | SERI B                        |               |        |
| 3      | Dra. Siti Chasanah            | 500.000.000   | 6,59%  | Dra. Siti Chasanah            | 539.500.000   | 6,55%  |
| 4      | PT. Induk Harta Insan Karimah | 3.090.000.000 | 40,73% | PT. Induk Harta Insan Karimah | 3.200.000.000 | 38,82% |
| 5      | Drs. Wahyu Hidayat            | 500.000.000   | 6,59%  | Drs. Wahyu Hidayat            | 539.500.000   | 6,55%  |
| 6      | Bagus Setiagung Budi Santoso  | 600.000.000   | 7,91%  | Bagus Setiagung Budi Santoso  | 600.000.000   | 7,28%  |
| 7      | Hj. Rini Sujiyanti, SE., MM.  | 420.000.000   | 5,54%  | Hj. Rini Sujiyanti, SE., MM.  | 453.200.000   | 5,50%  |
| 8      | Okty Prahalanitya             | 200.000.000   | 2,64%  | Okty Prahalanitya             | 200.000.000   | 2,43%  |
| 9      | Fuddy Heruzady                | 100.000.000   | 1,32%  | Fuddy Heruzady                | 107.900.000   | 1,31%  |
| 10     | Deddy Heriyanto               | 110.000.000   | 1,45%  | Deddy Heriyanto               | 118.700.000   | 1,44%  |
| 11     | Mochammad Sukron              | 1.280.000.000 | 16,87% | Mochammad Sukron              | 1.381.300.000 | 16,76% |
| 12     | Achyar Abdul Mutholib         | 200.000.000   | 2,64%  | Achyar Abdul Mutholib         | 215.800.000   | 2,62%  |
| 13     | Popy Prastikowati             | 200.000.000   | 2,64%  | Popy Prastikowati             | 200.000.000   | 2,43%  |
| 14     |                               |               |        | Bambang Haryadi Sutedjo       | 100.000.000   | 1,21%  |
| 15     |                               |               |        | Mokhamad Amin                 | 100.000.000   | 1,21%  |
| 16     |                               |               |        | Lita Damayanti                | 50.000.000    | 0,61%  |
| 17     |                               |               |        | Kaswiarti                     | 50.000.000    | 0,61%  |

## **BAB IV**

### **PENJELASAN DIREKSI**

#### **A. Kebijakan Merespon Tantangan dalam Pemenuhan Strategi Keberlanjutan**

Dalam menerapkan kebijakan merespon tantangan dalam pemenuhan strategi keberlanjutan mengintegrasikan aspek-aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dalam kegiatan usaha. Implementasi *Good Corporate Governance (GCG)* dalam setiap unit kerja disesuaikan dengan kapasitas perusahaan serta untuk bisnis yang berkelanjutan.

1. Nilai Keberlanjutan Bagi BPRS.

BPRS telah menanamkan *Corporate Culture (Budaya Perusahaan)* kepada seluruh Pegawai. Hal ini selaras dengan visi dan misi keuangan berkelanjutan, dimana BPRS juga menerapkan prinsip keberlanjutan dalam upaya mengembangkan budaya keberlanjutan di lingkungan BPRS. BPRS mengharapkan agar setiap pegawai dapat memaknai dan melaksanakan budaya keberlanjutan di dalam aktivitas kesehariannya.

2. Respon BPRS Terhadap Tantangan Kinerja Terkait Penerapan Keuangan Berkelanjutan.

BPRS HIK Jawa Tengah berupaya untuk mengikuti perkembangan keuangan berkelanjutan. Untuk merespon hal tersebut, BPRS menunjuk Tim yang menangani dan diharapkan dapat berkontribusi dan bersinergi dalam pencapaian kinerja keuangan berkelanjutan, juga sebagai wujud dalam membangun dan mendorong budaya keberlanjutan di lingkungan perusahaan. Untuk itu, BPRS secara konsisten mengadakan sosialisasi dan optimis seluruh pegawai dapat membawa dampak positif bagi perusahaan maupun lingkungan sekitar.

3. Komitmen BPRS Dalam Pencapaian Penerapan Keuangan Berkelanjutan.

BPRS HIK Jawa Tengah akan terus berkarya memberikan dampak positif kepada seluruh pemangku kepentingan. Kedepannya, BPRS optimis terhadap perkembangan perekonomian dan kinerja perbankan yang didukung oleh potensi bisnis yang terus meningkat baik dari pencapaian penghimpunan dana dan penyaluran dana pada kegiatan usaha berkelanjutan untuk meningkatkan usaha Nasabah.

4. Pencapaian Kinerja Dan Tantangan Penerapan Keuangan Berkelanjutan.

Di tahun 2024, BPRS HIK Jawa Tengah telah menorehkan kinerja dengan hasil yang cukup baik. Pada Pembiayaan terdapat pertumbuhan sebesar 78%, yaitu dari Rp. 20,4 miliar di tahun 2023 menjadi Rp. 36.4 miliar di tahun 2024. Pada Dana Pihak Ketiga terdapat pertumbuhan sebesar 82%, yaitu dari Rp. 25.4 miliar di tahun 2023 menjadi Rp. 49.1 miliar di tahun 2024. Pada perolehan Laba bersih terdapat penurunan 1,51%, dari (Rp. 1.10) miliar di tahun 2023 menjadi (Rp. 1.12) miliar di tahun 2024. Akan tetapi jika dibandingkan dengan rencana bisnis bank ada perbaikan  $\pm 8\%$ . BPRS masih membukukan kerugian karena harus membentuk PPAP pembiayaan bermasalah dan menyelesaikan permasalahan masa lalu (sebelum proses akuisisi)

Adapun tantangan kedepan dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami regulasi yang masih perlu ditingkatkan, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan program-program pelatihan dan sosialisasi, guna meningkatkan pengetahuan dan kompetensi karyawan serta menumbuhkan kesadaran dalam menerapkan keuangan

berkelanjutan, selain itu juga dengan membuat kebijakan internal yang terkait dengan keuangan keberlanjutan.

## **B. Penerapan Keuangan Berkelanjutan**

Dalam menjalankan program keuangan berkelanjutan, tetap berkomitmen dan berkontribusi pada 3 prinsip yaitu Ekonomi, Sosial dan Lingkungan hidup.

### **1. Ekonomi**

Menyesuaikan dengan kondisi pasar pada saat ini BPRS HIK Jawa Tengah terus mengembangkan dan menyediakan produk- produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Banyumas pada umumnya dengan target pasar utama adalah pengusaha UMKM dan juga pembiayaan umum lainnya.

### **2. Sosial**

Memberikan dampak positif bagi Masyarakat melalui edukasi dan literasi keuangan dan pemberdayaan yang berkelanjutan.

### **3. Lingkungan hidup**

Dampak langsung yang ditimbulkan dari kegiatan usaha BPRS HIK Jawa Tengah terhadap lingkungan hidup terbilang sangat kecil. Demikian juga dengan dampak tidak langsung yang ditimbulkan relatif terbatas. Namun demikian, BPRS memiliki komitmen yang tinggi untuk terus menekan dampak operasional terhadap lingkungan hidup dan turut berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan. Kami berupaya melakukan efisiensi penggunaan sumber energi listrik dan air serta penggunaan percetakan yang berlebihan.

## **Peristiwa Penting Yang Berkaitan Dengan Keuangan Berkelanjutan Di Tahun 2024**

### **1. Kick Off RBB 2024**

Kick Off RBB 2024 PT BPRS HIK Jawa Tengah melaksanakan kegiatan di Pangandaran selama 2 hari pada tanggal 3-4 Februari 2024.

### **2. Ramadhan 1445 H**

Pada bulan Ramadhan, PT BPRS HIK Jawa Tengah mengadakan buka puasa bersama di Waroenge Dewek pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2025.

### **3. Tasyakuran Milad Tahun BPRS HIK Jawa Tengah**

Milad PT BPRS HIK Jawa Tengah dilaksanakan tasyakuran pada tanggal 13 Juli 2024 dengan mengadakan lomba kejuaraan badminton antar karyawan.

### **4. Peringatan 17 Agustus 2024**

PT BPRS HIK Jawa Tengah ikut memperingati Hari Kemerdekaan RI dengan mengadakan lomba-lomba seperti lomba makan kerupuk, lomba memasukan sedotan ke dalam botol, lomba menyerok uang dan lomba balap tampah.

### C. Strategi Pencapaian Target

Rencana strategis BPRS HIK Jawa Tengah dalam konteks Keuangan Keberlanjutan mencakup komitmen yang kuat untuk menjaga keberlanjutan keuangan, memastikan pertumbuhan yang seimbang, serta meminimalkan dampak lingkungan dan sosial dalam operasionalnya. Dalam hal ini, BPRS akan fokus pada penerapan inisiatif keuangan yang tidak hanya menguntungkan bagi keberlanjutan bisnis, tetapi juga memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan.

BPRS berencana untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya finansialnya dengan strategi efisiensi operasional, diversifikasi portofolio keuangan yang berkelanjutan, dan pengelolaan risiko yang cermat. Selain itu, BPRS akan melibatkan para Pemangku Kepentingan, termasuk Nasabah, Mitra Bisnis, dan Komunitas Lokal, dalam upaya membangun keberlanjutan ekonomi bersama.

Untuk mencapai tujuan ini, BPRS berkomitmen untuk mengembangkan produk dan layanan keuangan yang berfokus pada tanggung jawab sosial, termasuk produk Tabungan dan investasi yang mendukung proyek-proyek lingkungan berkelanjutan. BPRS juga akan memberikan edukasi keuangan kepada nasabah untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, BPRS HIK Jawa Tengah akan terus memonitor kinerja keuangan dan dampak sosialnya, melibatkan diri dalam pelaporan keberlanjutan secara transparan, serta melibatkan pemangku kepentingan dalam dialog terbuka untuk meningkatkan kebijakan dan praktik-praktik berkelanjutan.

Penerapan Keuangan Berkelanjutan ini memperkuat komitmen BPRS HIK Jawa Tengah untuk menjadi agen perubahan positif dalam industri keuangan, menciptakan nilai jangka panjang, dan memberikan kontribusi yang berarti terhadap keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

#### **Mitigasi Risiko Atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan**

Mitigasi Risiko yang dilakukan oleh BPRS HIK Jawa Tengah adalah penerapan sistem pengendalian internal yang merujuk kepada konsep *Three Lines of Defense* yang sesuai dengan Internal Control Framework yang melibatkan seluruh unit kerja. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

##### *1. First Line of Defense*

*First Line of Defense* dikelola oleh masing-masing unit kerja sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, sebagai berikut:

- a) Peningkatan penguasaan untuk proses bisnis/ kerja utama.
- b) Melakukan identifikasi dan pengukuran kembali terhadap risiko operasional utama yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sehari-hari.
- c) Peningkatan kontrol dan pelaksanaan tindakan preventif yang diperlukan agar dampak dan frekuensi risiko dapat diminimalisir.

2. *Second Line of Defense*

*Second Line of Defense* dikelola oleh *Risk Management and Compliance* sebagai berikut:

- a) Peningkatan fungsi *check & balance* guna mendukung operasi bisnis yang prudent.
- b) Sosialisasi program pengembangan budaya risiko dan kepatuhan kepada semua jenjang/ tingkatan organisasi.
- c) Implementasi *Enterprise Risk Management* untuk mengelola risiko secara menyeluruh dan terintegrasi.
- d) Penyempurnaan kebijakan, pedoman, prosedur, dan kerangka manajemen risiko yang komprehensif.

3. *Third Line of Defense*

*Third Line of Defense* dikelola oleh Internal Audit sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan Audit Rutin Berkala ke Unit Kerja BPRS.
- b) Pelaksanaan mekanisme Whistleblowing System serta kebijakannya.
- c) Pelaksanaan review dan sosialisasi/ refreshment/ role play secara berkala untuk meningkatkan budaya sadar risiko (*Risk Awareness*) dan budaya anti fraud (*Zero Fraud & Tolerance*).
- d) Pelaksanaan surprise audit secara berkala terhadap auditee yang tidak termasuk dalam Rencana Kerja Audit Tahunan.

### **Langkah-langkah Strategis BPRS**

Rencana strategis BPRS HIK Jawa Tengah menjadi pedoman utama dalam merumuskan langkah-langkah keuangan berkelanjutan. Secara garis besar langkah-langkah strategis yang akan diambil meliputi:

1. Peningkatan kompetensi bagi karyawan atau unit kerja yang menjalankan fungsi keuangan berkelanjutan.
2. Melakukan kampanye gerakan efisiensi dan peduli lingkungan.
3. Mengoptimalkan penyaluran pembiayaan pada sektor usaha yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan.
4. Penekanan pada pengembangan produk dan layanan yang berkaitan dengan keuangan keberlanjutan.
5. Menjalin kerjasama dengan mitra strategis dan lembaga keuangan syariah lainnya untuk memperluas akses ke sumber daya dan pasar.

Dalam hal memberikan layanan terbaik dalam industri perbankan, BPRS HIK Jawa Tengah semaksimal mungkin melakukan langkah langkah strategis untuk memperkuat aset, meningkatkan profit, dan meningkatkan manajemen risiko.

Adapun situasi eksternal ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan BPRS adalah kebijakan Pemerintah (Regulator). Maka dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) telah menetapkan sektor unggulan prioritas, antara lain kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri.

## BAB V

### TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

#### A. Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan

| Jabatan                                                 | Tugas dan Tanggung Jawab                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dewan Komisaris                                         | Bertanggung jawab terhadap Pengawasan Penyusunan Rencana & Pelaksanaan Program Aksi Berkelanjutan.                                                                                                                                                                                                     |
| Direksi                                                 | Bertanggung jawab terhadap Pengelolaan Program Aksi Berkelanjutan secara keseluruhan.                                                                                                                                                                                                                  |
| Unit kerja yang membawahkan fungsi Pembiayaan           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memproyeksikan pertumbuhan penyaluran dana.</li> <li>2. Merealisasikan penyaluran dana.</li> <li>3. Pelaporan realisasi penyaluran dana.</li> <li>4. Mengelola pelaksanaan program aksi keuangan berkelanjutan di bidang Pembiayaan.</li> </ol>              |
| Unit kerja yang membawahkan fungsi penghimpunan dana    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memproyeksikan pertumbuhan penghimpunan dana.</li> <li>2. Merealisasikan penghimpunan dana.</li> <li>3. Pelaporan realisasi penghimpunan dana.</li> <li>4. Mengelola pelaksanaan program aksi keuangan berkelanjutan di bidang penghimpunan dana.</li> </ol> |
| Unit kerja yang membawahkan fungsi Teknologi Informasi  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan penyesuaian sistem teknologi terkait pelaksanaan program aksi keuangan berkelanjutan.</li> <li>2. Melakukan publikasi via website, banner dan social media terkait realisasi program aksi keuangan berkelanjutan</li> </ol>                        |
| Unit kerja yang membawahkan fungsi SDM dan training     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertanggung jawab terhadap kegiatan literasi dan inklusi keuangan</li> <li>2. Melakukan peningkatan kualitas SDM terkait program aksi keuangan berkelanjutan.</li> </ol>                                                                                     |
| Unit kerja yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Menris | Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program aksi keuangan berkelanjutan terkait dengan kesesuaian ketentuan.                                                                                                                                                                                     |
| Unit kerja yang membawahkan fungsi Pembukuan            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan support penyusunan rencana anggaran kegiatan.</li> <li>2. Melakukan pencatatan transaksi atas pelaksanaan program aksi keuangan berkelanjutan.</li> </ol>                                                                                         |
| Unit Kerja Audit Internal                               | Memonitoring dan memeriksa kebenaran pelaksanaan program aksi keuangan berkelanjutan.                                                                                                                                                                                                                  |

## **B. Pengembangan Kompetensi Keuangan Berkelanjutan**

BPRS menargetkan secara bertahap seluruh Pegawai telah mengikuti pelatihan atau sosialisasi keuangan berkelanjutan. Pentingnya BPRS dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan pegawai sesuai dengan tujuan dan arah organisasi bisnis BPRS, sehingga dapat terus bersaing dengan kondisi pasar dan BPRS secara global.

Pengembangan kompetensi terkait penerapan keuangan berkelanjutan di tahun 2024, antara lain :

1. Sosialisasi & Pelatihan CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai)
2. Capacity Building
3. Professional Internal Audit
4. Strategi Pengelolaan Investasi Industri Perasuransian dan Dana Pensiun
5. Pelatihan Pajak PPh 21
6. Sosialisasi Peran Taksonomi Untuk Keuangan Berlanjutan Indonesia (TKBI) Dalam Mendorong Transisi Energi Net Zero Emission Indonesia
7. Pengembangan Kualitas SDM BPR
8. Pelatihan Teknik & Strategi Sosial Media Marketing & SEO
9. Pelatihan Dasar Perbankan Syariah
10. Sosialisasi Ketentuan Terkait Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi dan Perlindungan Konsumen di Purwokerto
11. Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan BPRS Berbasis SAK EP dan PSAK Syariah
12. Sosialisasi Peluang dan Tantangan Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi di Era Digital
13. Pelatihan Menyusun Laporan IRA (Individual Risk Assessment) & Implementasi APU PPT P3SPM Pada BPR/S Sesuai POJK 08/2023
14. Sosialisasi Pelaporan Rencana dan Realisasi Kegiatan Literasi serta Inklusi Keuangan melalui Sistem Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SIPEDULI)
15. Sosialisasi Penangan Kejahatan Siber Termasuk Perjudian Daring Sebagai Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Pencucian Uang
16. Sosialisasi Implementasi Strategi Anti Fraud BPR/S sesuai POJK 09/2024 Tata Kelola BPR-S Pasal 87 s.d 90
17. Sosialisasi Penerapan Kepatuhan di Bank
18. Pelatihan Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah dengan Gugatan Sederhana
19. Sosialisasi APU PPT dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
20. Pelatihan Cash Flow & Analisa Laporan Keuangan

## **C. Manajemen Risiko Penerapan Keuangan Berkelanjutan**

BPRS HIK Jawa Tengah secara konsisten menerapkan manajemen risiko dalam setiap aspek aktivitas usahanya. Pengidentifikasian dan pengelolaan risiko di BPRS HIK Jawa Tengah dilakukan terhadap empat jenis risiko, sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.23/POJK.03/2018 dan SEOJK No.10/SEOJK03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Jenis risiko yang diidentifikasi dan dikelola meliputi risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, dan risiko likuiditas. Namun PT BPRS HIK Jawa Tengah

dengan modal kurang dari Rp. 50 Miliar menerapkan 4 risiko meliputi risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, dan risiko likuiditas.

Mengacu pada POJK dan SEOJK tersebut, BPRS HIK Jawa Tengah telah memiliki Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko dengan Nomor 07/KB-ManRisk-Kep/620089/2024 tertanggal 06 November 2024.

Penerapan Monitoring, Evaluasi dan Mitigasi Berdasarkan Risiko sebagai berikut:

1. Pengawasan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah  
Memastikan seluruh pengawasan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk meningkatkan peran Pengurus dalam pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi perusahaan.
2. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko  
Penerapan manajemen risiko yang efektif harus didukung dengan kerangka yang mencakup kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta limit Risiko yang ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis perusahaan.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko serta sistem manajemen risiko  
Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan Manajemen Risiko. Identifikasi Risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis BPRS dan dilakukan dalam rangka menganalisis sumber risiko dan kemungkinan dampak yang muncul. Selanjutnya, BPRS perlu melakukan pengukuran risiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha.
4. Sistem pengendalian intern  
Sistem pengendalian intern merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh pengurus BPRS secara berkesinambungan. BPRS harus melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi. Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang menyeluruh paling sedikit harus mampu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi secara tepat waktu. Berdasarkan ruang lingkup manajemen risiko, pengendalian internal paling sedikit mencakup :
  - a) Kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha dan jenis layanan perusahaan.
  - b) Penetapan wewenang dan tanggungjawab untuk pemantauan kepatuhan terhadap kecukupan kebijakan manajemen risiko.
  - c) Penetapan wewenang dan tanggungjawab pemantauan kepatuhan terhadap kecukupan prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko.
  - d) Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas.
  - e) Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha perusahaan.
  - f) Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu.

- g) Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap perundang- undangan dan ketentuan yang berlaku bagi perusahaan dan prinsip syariah.
- h) Dokumentasi secara lengkap dan memadai.
- i) Verifikasi dan kaji ulang terhadap sistem pengendalian intern.

Secara berkala dan berkelanjutan, BPRS melakukan evaluasi pencapaian target untuk memastikan bahwa sasaran dan target sudah berjalan sesuai dengan yang ditetapkan. Unit Kerja Manajemen Risiko secara berkala melakukan pemantauan portofolio pembiayaan dan memastikan diversifikasi penyaluran pembiayaannya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan BPRS, selanjutnya hasil pemantauan tersebut disampaikan kepada Direksi.

#### **D. Pendekatan Kepada Pemangku Kepentingan dalam Penerapan Keuangan Berkelanjutan**

Pelibatan pemangku kepentingan merupakan unsur yang tidak bisa dilepaskan untuk keberlanjutan bisnis perusahaan. BPRS menyadari bahwa keterlibatan seluruh pihak dapat memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Oleh karena itu BPRS melibatkan pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan program berdasarkan isu di lapangan dan kebutuhan masing- masing pemangku kepentingan. Umpan balik pemangku kepentingan ini kemudian menjadi pertimbangan untuk menyusun kebijakan dan pelaksanaan program yang akan dilakukan.

#### **E. Permasalahan, Perkembangan, dan Pengaruh terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan**

Dalam proses implementasi keuangan berkelanjutan, BPRS HIK Jawa Tengah menghadapi sejumlah tantangan baik dari aspek internal maupun eksternal. Salah satu tantangan utama adalah belum optimalnya pemahaman dan kapasitas internal, baik di tingkat manajemen maupun karyawan, terkait dengan konsep dan praktik keuangan berkelanjutan. Selain itu, belum terintegrasinya tugas dan tanggung jawab secara spesifik pada unit kerja yang ditunjuk juga menjadi hambatan dalam memastikan implementasi yang konsisten dan menyeluruh.

Dari sisi eksternal, dinamika kebijakan dan regulasi yang terus berkembang, baik dari otoritas perbankan maupun pemerintah memerlukan kesiapan adaptasi dan fleksibilitas dari lembaga untuk tetap menjaga relevansi dan kepatuhan terhadap standar keberlanjutan yang ditetapkan.

## BAB VI

### KINERJA KEBERLANJUTAN

#### A. Kegiatan Membangun Budaya Berkelanjutan

BPRS menanamkan nilai-nilai luhur dan menerapkan prinsip berkelanjutan dalam upaya mengembangkan budaya berkelanjutan di lingkungan BPRS. BPRS telah memiliki budaya perusahaan yang ditetapkan, yang dinilai penting dan efektif dapat membantu perusahaan dalam memudahkan mencapai tujuan. Budaya perusahaan tersebut dapat memberikan nilai tambah baik dalam kehidupan saat ini maupun di masa mendatang.

Nilai-nilai serta prinsip berkelanjutan selaras dengan nilai-nilai perusahaan yang dimiliki oleh BPRS. Budaya Keberlanjutan yang diterapkan melalui Corporate Culture yang ditanamkan oleh BPRS kepada Pegawai, dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas dalam bekerja sehingga menginspirasi Karyawan untuk melaksanakan aksi keuangan berkelanjutan terutama dalam berkomunikasi maupun saling memotivasi antar karyawan di lingkungan serta dalam meningkatkan kualitas pelayanan BPRS.

#### B. Kinerja Ekonomi

Kinerja ekonomi dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat dari perbandingan target dan realisasi berikut:

| URAIAN                 |           | 2024            | 2023            | 2022            |
|------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aset                   | Target    | 50.728.662.476  | 28.143.761.158  | 15.669.568.000  |
|                        | Realisasi | 54.676.923.308  | 31.123.403.255  | 15.317.106.231  |
| Pembiayaan             | Target    | 35.367.991.679  | 20.367.991.679  | 12.221.299.000  |
|                        | Realisasi | 36.406.787.974  | 20.445.444.182  | 10.733.386.185  |
| Pendapatan Operasional | Target    | 4.884.986.347   | 2.676.774.824   | 1.986.999.000   |
|                        | Realisasi | 5.610.600.606   | 2.399.419.116   | 1.370.915.042   |
| Laba Bersih            | Target    | (1.208.050.879) | (652.351.546)   | 51.405.000      |
|                        | Realisasi | (1.122.195.002) | (1.105.525.991) | (1.947.307.000) |

#### C. Kinerja Sosial

- Memberikan layanan atas produk dan/atau jasa yang setara kepada nasabah  
BPRS HIK Jawa Tengah memberikan layanan yang setara kepada seluruh nasabah dan *stakeholders* untuk menciptakan kenyamanan bertransaksi, kemudahan konsultasi terkait solusi perbankan, serta kepuasan nasabah dalam menikmati produk BPRS. Layanan Prima (*Service Excellent*) menjadi fokus utama BPRS. Untuk hal tersebut maka pihak BPRS membekali seluruh Karyawan dengan pengetahuan atau Training *Service Excellent* atau pengetahuan tentang Komunikasi produktif, sehingga BPRS terus mendorong karyawan untuk dapat memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh nasabah dan stakeholders. Secara berkala BPRS melakukan evaluasi terhadap kualitas layanan kepada nasabah dengan kegiatan review kinerja bulanan.

## 2. Ketenagakerjaan

### a) Kesempatan Bekerja

BPRS senantiasa memberikan kesempatan yang sama bagi setiap Pegawai tanpa memandang suku, ras, golongan, dan gender, dimana salah satu perwujudannya untuk menghormati HAM adalah dengan mendukung peran serta perempuan dalam kepemimpinan. Dalam penempatan posisi jabatan pegawai, ditetapkan berdasarkan kinerja dan kompetensi individu yang bersangkutan. Demikian juga, untuk komposisi organ tata kelola perusahaan telah mencerminkan keberagaman baik dalam hal gender, pendidikan, pengalaman kerja, usia, maupun keahlian. Kebijakan BPRS perihal jam kerja diatur dalam Peraturan Perusahaan yaitu sebanyak 8 jam per hari.

### b) Remunerasi Pegawai

Remunerasi pegawai diberikan berdasarkan kinerja setiap pegawai dalam menjalankan kewajiban dalam satu tahun buku yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No 10/KepDir/620089/I/2024. Remunerasi bagi pegawai pada tingkatan terendah sekurang-kurang sebesar Upah Minimum Regional Kabupaten Banyumas

### c) Lingkungan Kerja yang Layak dan Aman

BPRS telah berusaha untuk menerapkan lingkungan kerja yang sehat, layak, dan aman untuk melindungi keselamatan seluruh karyawan, nasabah, mitra kerja, dan pemangku kepentingan lainnya. Wujud penerapan lingkungan kerja yang sehat, layak dan aman adalah:

- 1) Melengkapi infrastruktur kantor dengan sarana pengamanan diantaranya APAR (Alat Pemadam Api Ringan) untuk pencegahan dan meningkatkan kewaspadaan akan terjadinya kebakaran.
- 2) Pemeliharaan gedung dan lingkungan kantor, dengan melakukan pengecekan berkala.

Guna menunjang produktivitas dan kepuasan pegawai, BPRS HIK Jawa Tengah mendukung adanya aktivitas di luar pekerjaan, baik di bidang olahraga, hobi maupun kegiatan keagamaan. Aktivitas olah raga yang difasilitasi BPRS HIK Jawa Tengah antara lain senam, futsal / *mini soccer*, bulutangkis. Kegiatan keagamaan meliputi pengajian rutin pegawai, doa bersama, buka puasa bersama dan kegiatan agama lainnya. BPRS HIK Jawa Tengah meyakini, kenyamanan bekerja dalam seluruh aspek akan mendorong loyalitas dan produktivitas setiap pegawai untuk berkontribusi dalam kinerja BPRS HIK Jawa Tengah secara keseluruhan.

### d) Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Pegawai

BPRS HIK Jawa Tengah memiliki kebijakan pengembangan SDM yang ditetapkan selaras dengan rencana pengembangan bisnis. Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM, BPRS HIK Jawa Tengah berkomitmen untuk memberikan pendidikan dan pelatihan di seluruh aspek operasional perbankan secara terencana dan berkelanjutan. Upaya peningkatan kompetensi ini diselenggarakan dengan menjunjung tinggi prinsip persamaan kesempatan kepada seluruh pegawai.

Pada tahun 2024 jumlah Pengurus dan Pegawai yang mengikuti program peningkatan kompetensi mencapai 23 personal yang terdiri dari Pengurus dan Pegawai. Setiap pegawai wajib mengikuti pelatihan minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya. Besaran investasi yang dikeluarkan BPRS HIK Jawa Tengah untuk program pendidikan dan pelatihan di tahun 2024 sebesar Rp. 76.547.085,-

### 3. Masyarakat

#### a) Literasi dan Inklusi Keuangan

BPRS HIK Jawa Tengah aktif dalam program peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat sejalan dengan program pemerintah. Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah melakukan sosialisasi produk dan jasa perbankan kepada lapisan masyarakat yaitu pegawai, pelaku UMKM dan pedagang pasar, pelajar, dan masyarakat lainnya. Sekaligus memberikan edukasi tentang peningkatan *awareness* masyarakat terhadap penggunaan sosial media dalam rangka program literasi keuangan BPRS. BPRS HIK Jawa Tengah juga melakukan edukasi dan literasi keuangan kepada pelajar tentang budaya menabung dan manfaat menabung sejak dini. Tabungan siswa bisa dilakukan melalui lembaga pendidikan/ sekolah dengan Tabungan Sekolah.

#### b) Mekanisme Pengaduan Masyarakat

Mekanisme pengaduan nasabah telah disosialisasikan melalui media sosial BPRS dan papan pengumuman. Selain itu disediakan juga *whistle blowing system* sebagai media pengaduan masyarakat. Secara rutin BPRS HIK Jawa Tengah telah mengumumkan jumlah pengaduan nasabah setiap triwulan berikut penyelesaiannya sesuai dengan POJK Nomor 22 tahun 2023.

#### c) Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan

BPRS HIK Jawa Tengah melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan berlandaskan pada komitmen, kewajiban dan tanggung jawab secara hukum, sosial, moral, etika serta didasari oleh adanya kesadaran yang tinggi terhadap kepentingan masyarakat sekitar bahwa keberhasilan perusahaan tidak terlepas dari hubungan yang harmonis, dinamis, serta saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar.

## D. Kinerja Lingkungan Hidup

Dampak kinerja lingkungan hidup atas sumber daya yang digunakan, baik dari proses organisasi BPRS maupun implikasi lingkungan hidup dari aktivitas produk dan jasa, sehingga dapat mendorong BPRS untuk turut menjaga dan melestarikan Lingkungan Hidup, diantaranya yaitu:

### 1. Penghematan Energi Listrik

- melakukan pengecekan konsumsi listrik secara berkala
- Efisiensi energi : mengurangi konsumsi listrik dengan penggunaan lampu hemat energi dan peralatan elektronik yang lebih efisien
- Melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan untuk meningkatkan kesadaran pemakaian lampu dan peralatan elektronik dan telepon saat tidak dipakai.

### 2. Penggunaan Air

- Melakukan pengecekan serta perawatan instalasi air dan keran setiap bulan.

- b) Melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan program Edukasi penghematan air.
- c) Mengawasi penggunaan air secara berkala.
- 3. Pengendalian Penggunaan Kertas
  - a) Penggunaan kembali kertas bekas (kertas yang satu sisi bagiannya pernah dipakai namun sisi yang lain masih bersih dan bisa digunakan untuk mencetak) untuk pengajuan berkas yang masih bersifat draft atau dokumen untuk keperluan internal yang sifatnya tidak urgent.
  - b) mengoptimalkan program digitalisasi dalam rangka paperless di lingkungan kantor.
- 4. Pengendalian Limbah Sampah Plastik
  - a) Setiap pelaksanaan rapat dan kegiatan training internal, tidak disediakan air minum kemasan sekali pakai, hanya disediakan galon air minum dimana masing-masing karyawan dihibau untuk membawa botol air minum secara mandiri.
  - b) Menyediakan fasilitas dan sarana air minum isi ulang di setiap kantor.
  - c) Mengurangi penggunaan air minum dalam kemasan plastik.
- 5. Pengendalian Energi Bahan Bakar Kendaraan
  - a) BPRS HIK Jawa Tengah melakukan monitoring penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan operasional agar sesuai dengan peruntukannya serta sesuai tingkat kewajaran.
  - b) Dilakukan kroscek oleh Petugas yang ditunjuk seperti driver, jika ada permintaan pengisian BBM untuk kegiatan perjalanan dinas, untuk selanjutnya meminta persetujuan kepada Pejabat yang berwenang.

## **E. Tanggung Jawab Pengembangan Produk dan Jasa Keuangan Berkelanjutan**

### **1. Inovasi dan Pengembangan Produk/layanan**

| <b>NO</b> | <b>JENIS PRODUK</b> | <b>NAMA PRODUK</b>                        |
|-----------|---------------------|-------------------------------------------|
| 1         | Pembiayaan          | Pembiayaan ASN                            |
|           |                     | Pembiayaan Pensiunan                      |
|           |                     | Pembiayaan NON ASN                        |
|           |                     | Pembiayaan PMI (Pekerja Migran Indonesia) |
|           |                     | Pembiayaan Umum                           |
|           |                     | Pembiayaan Developer                      |
|           |                     | Pembiayaan Property                       |
| 2         | Pendanaan           | Tabungan SAKU                             |
|           |                     | Tabungan KU                               |
|           |                     | Tabungan Antar Bank                       |
|           |                     | Tabungan Ceria                            |
|           |                     | Tabungan Hari Raya                        |
|           |                     | Tabungan Qurban                           |
|           |                     | Tabungan Simpel                           |
|           |                     | Deposito Mudharabah IB                    |
|           |                     | Deposito ABP (Antar Bank Pasiva)          |

2. Dampak dari Produk/Jasa Berkelanjutan

Dampak dari inovasi produk dan jasa yang berkaitan dengan Keuangan Keberlanjutan adalah untuk menunjang bisnis keuangan berkelanjutan, ramah lingkungan serta dapat memudahkan nasabah bertransaksi secara mudah. Masyarakat menjadi lebih mudah terlayani dalam mendapatkan fasilitas pembiayaan mikro dengan tetap mengikuti kaidah prudential banking yang sudah ditetapkan.

3. Evaluasi Keamanan Produk dan layanan

- a. Melakukan pengawasan evaluasi kualitas layanan dengan melakukan survey kepuasan nasabah secara periodik.
- b. Memanfaatkan teknologi informasi di era digital mengikuti perkembangan digitalisasi sehingga menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien.
- c. Memperkuat sistem keamanan informasi yang merupakan bagian dari konsekuensi dalam rangka peningkatan teknologi informasi.
- d. Melakukan edukasi kepada masyarakat tentang penipuan perbankan dan investasi bodong yang marak di tengah masyarakat untuk meningkatkan pemahaman sehingga terhindar dari pihak- pihak yang tidak bertanggungjawab

Lampiran Kegiatan Keuangan Berkelanjutan BPRS HIK Jawa Tengah Tahun 2024 - Bidang Sosial & Lingkungan

